BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya otonomi daerah memberi angin segar untuk pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Munculnya Undang-Undang 32 tahun 1999 tentang pemerintah daerah merupakan landasan bagi pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri dengan seluas-luasnya. Sebelum berlakunya Undang-undang tersebut kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI). Munculnya undang-undang ini memberi kesempatan untuk masyarakat memilih pemimpin daerahnya sendiri tanpa harus ada intervensi dari pemerintah pusat. Dengan demikian tumbuh harapan bahwa demokrasi dapat diwujudkan melalui pemilihan kepala daerah secara langsung.

Beberapa ahli memandang bahwa adanya otonomi daerah berpotensi untuk melahirkan kelompok penguasa baru yang akan memperkuat sikap primordialisme kedaerahan baik itu, kelompok adat, dan tokoh-tokoh ormas yang memiliki masa yang besar atau adanya golongan-golongan tertentu yang diuntungkan dengan adanya otonomi daerah. Dengan modal sosial dan modal simbolik yang dimiliki oleh ormas Islam dan kelompok adat memudahkan para tokohnya untuk menduduki jabatan publik di pemerintahan baik pada wilayah eksekutif maupun legislatif (Hamdi, 2011).

Seseorang atau sekelompok orang yang memiliki modal sosial atau modal simbolik akan dengan mudah mendapatkan kedudukan strategis di dalam kehidupan masyarakat termasuk jabatan pemerintahan pada seperti Gubenur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota . Seperti Ormas Islam yang berkembang diantara kehidupan masyarakat yang berdiri sejak orde lama hingga sekarang diantaranya Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), dan Nahdatul Wathan (NW) merupakan ormas Islam yang sukses dalam berbagai bidang baik pendidikan, sosial, politik, dan keagamaan, dengan jumlah masa yang besar. Setiap ormas islam termasuk Nahdlatul Wathan memiliki peran penting dalam mengantarkan kader-kadernya pada jabatan strategis dalam bidang politik. Pada dasarnya NW didirikan khusus untuk pemberdayaan masyarakat lokal suku sasak.

Salah satu tokoh yang masih sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial maupun politik di Indonesia adalah ulama dan Kyai yang memiliki posisi strategis yang mampu memberi pengaruh kepada sekelompok masyarakat. Di Indonesia ulama maupun Kyai memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat karena dianggap mampu menuntun kepada jalan yang sesuai dengan syariat Islam serta dianggap sebagai panutan masyarakat. Sehingga, tidak sedikit masyarakat di Indonesia mengikuti apa yang dikatakan dan dilakukan oleh kyai.

Menurut Fealy (2011) di Indonesia hal utama yang dibangun oleh para ulama yang menyadarkan diri pada institusi yang berbasis pada pendidikan (Islam)

yang bernama pesantren yang menempatkan diri ulama; kyai di Jawa Timur dan Madura; buya di Sumatra Barat, sebagai patron dengan modal pengetahuan agamanya. Kecenderungan pesantren yang banyak dibangun di kampung-kampung, sehingga memungkinkan terjadinya interkasi yang intens antara masyarakat dan ulama. Dengan modal pengetahuan dan posisi ulama sebagai entitas tertinggi di institusi pesantren tersebut, menempatkan para ulama sebagai sosok dengan ketokohan yang sentral, terutama masyarakat berbasis islam tradisonal (Oktara, 2015).

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas salah satu ketokohan yang masih eksis di Indonesia saat ini yaitu Ulama gelar yang diberikan oleh masyarakat karena pehamannya terhadap agama. Tidak dapat dipungkiri pada sebagaian besar masyarakat Indonesia masih sensitif dengan isu-isu keagamaan. Di Indonesia pada saat ini banyak didirikannya partai-partai Islam yang tidak sedikit mengantarkan kader-kadernya pada kursi legislatif maupun eksekutif. Sehingga bagi seseorang yang memiliki latar belakang organisasi keagamaan yang kuat akan mempermudah jalannya dalam menduduki jabatan strategis di masyarakat bahkan jabatan politik. Salah satu organisasi keagamaan yang mampu mengantarkan kadernya menduduki jabatan startegis dalam bidang politik adalah organisasi Nadlatul Wathan.

Organisasi Nahdlatul Wathan didirikan oleh ulama yakni Maulana Syaikh Tuan Guru Kyai Haji (TGKH) M. Zainuddin Abdul Majid. NW dideklarasikan pada hari minggu 15 Jumadil Akhir 1372 H bertepatan dengan tanggal 1 Maret 1953 di Pancor Lombok Timur, NTB. Sama halnya dengan organisasi keagamaan lainnya NW juga bergerak pada bidang sosial,da'wah keagamaan dan pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang kini tengah berkembang di kalangan masyarakat Lombok bahkan NTB. Disamping itu, sebagai organisasi keagamaan NW juga berkiprah pada bidang politik yang membangun relasi dengan beberapa partai sejak era orde baru yakni partai Masyumi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Golongn Karya (Golkar) (Abdurrahman, 2014:2).

Da'wah dan pengajian seringkali dilakukan ke pelosok desa-desa terpencil bahkan ke beberapa daerah yang ada di Indonesia. Pada tahun 1952, organinsasi Nahdlatul Wathan menyebar dan memiliki 66 cabang di seluruh Indonesia. Sedangkan, pada bidang pendidikan berbasis NW pada tahun 1997 telah terbangun dari 700 madrasah yang tidak hanya menyebar dipulau Lombok tetapi diseluruh Indonesia. Sampai saat ini lebih dari 1000 madrasah yang didirikan oleh organisasi keagamaan NW yang tersebar diseluruh Indonesia (http://lombokita.com/diakses

Namun, sejak wafatnya Maulana Syaikh pada tahun 1977 mengakibatkan munculnya konflik internal organisasi tersebut yang melibatkan antara keluarga, kerabat dan eli-elit NW. Wafatnya Syeikh kala itu menimbulkan pertanyaan siapa yang akan mengganti posisinya sebagai pemimpin NW mengingat bahwa pendiri

NW tersebut tidak memiliki anak laki-laki tetapi hanya dua anak perempuan Rauhun (RI) dan Raihanun (R2) yang lahir dari ibu yang berbeda karena pada saat itu Syeik memiliki dua istri (poligami). Dari dua putri Syeikh tersebut membuat perpecahan dan menciptakan kubu masing-masing. Disamping itu, kanflik semakin kuat ketika elit-elit NW tidak pernal netral dalam mempelakukan kedua putri Syeikh.

Konflik NW memuncak pada Mukhtamar ke-10 di Praya Lombok Tengah 1998. Mukhtamar ini dilakukan untuk memilih pemimpin NW selanjutnya, ada dua calon yang muncul pada saat itu yakni Raihanun dan Ma'sum Ahmad. Raihanun didukung dari kubu (R2) sedangkan Ahmad didukung oleh kubu RI (Rauhun) memperoleh 54 suara dan Ahmad 34 suara, 1 abstain, 1 batal, dan 2 utusan tidak ikut memilih (Hamdi, 2011, dalam (Hamdi, 2011:5).

Munculnya nama Raihanun pada bursa bakal calon Ketum tidak pernah diperkirakan oleh kubu R1 karena selama ini Raihanun dikenal sebagai ibu rumah tangga. Namun, kesuksekan Raihanun tidak terlepas dari posisinya sebagai putri Syeikh dan pengaruh kuat suaminya yang memiliki pengikut fanatik ketika memimpin NW bersama Syeikh (Hamdi, 2011). Sehingga, dari konflik NW telah melahirkan dualism kepemimpinan yaitu NW Pancor dari kubu Raihanun dan NW Anjani dari kubu Rauhun.

Namun, terlepas dari konflik yang terjadi pada NW, organisasi ini pada akhirnya mampu menghantarkan tokohnya pada posisi yang strategis dibidang

pemerintahan seperti Gubernur, Bupati, Anggota DPR, dan DPRD. Hal ini menunjukkan kesuksekan NW sekaligus menunjukkan eksistensinya sebagai organisasi terbesar di Lombok yang dapat memainkan peran penting di daerah. NW merupakan organisasi sosial keagamaan terbesar di Lombok yang pertama kali di dirikan oleh Tuan Guru Haji (TGH) Muhammad Zainuddin Abdul Madjid.

NW memiliki basis masa terbesar di lombok mencapai 60-80% dari penduduk lombok sedangkan umat Islam lainnya berafiliasi ke NU, Muhammadiyah, Wahabi, salafi, Tariqat, Ta'limat, Ahmadiyah, dam Tariqat Qadiriyah wa Naqshabandiyah (Hamdi & Smith: 2011, dalam (Hamdi, 2011:132).

Pada pemilihan kepala daerah tahun 2008 NW mampu membawa tokohnya ke posisi paling strategis yakni orang nomor satu di NTB yaitu KH. M. Zainul Madjdi, MA. Atau yang dikenal dengan "tuan guru bajang (TGB)" dengan peolehan suara 847.976 (38.84%) yang disusul oleh No. Urut 3 yakni Drs. H. Lalu Serinata dengan perolehan suara 581.123 (27.395) (https://www.merdeka.com/ di akses pada 6 Februari 2018).

Kemudian pada pemilu 2013 TGB kembali memenangkan kursi Gubernur yang kedua kalinya. Hal ini menandakan makin eksisnya NW dalam panggung politik di NTB. Kemenangan yang dirasakan oleh TGB juga dimenangkan oleh beberapa kader NW lainnya dalam pemilihan kepala daerah tingkat Kabupaten pada tahun 2009-2014 Tokoh NW Zaeny Arony yang merupakan salah satu pengurus struktural di jajaran PB NW berhasil memenangkan kursi Bupati. Selain

itu NW juga mampu mengantarkan kadernya dalam jabatan strategis lainnya yakni di Lombok timur yang memenangkan kursi Bupati dengan perolehan suara 278.355 (49.91%) (Hamdi, 2011:139).

Kemudian pada tahun 2010 pada pemilihan kepala daerah tingkat Kabupaten di Lombok Utara dimenangkan oleh Djohan Sjamsu yang berpasangan dengan H. Najmul Akhyar pada saat itu merupakan pilkada pertama bagi Kabupaten lombok utara karena baru pemekaran. Apabila dilihat lebih dalam Najmul Akhyar merupakan seseorang yang latar belakangnya adalah NW dan aktif dalam ormas tersebut. Sehingga, banyak yang berpendapat bahwa kemenangan bupati Djohan Sjamsu karena didukung oleh wakilnya yang notabennya adalah NW.

Kemudian pada pilkada Kabupaten Lombok Utara 2015 kedua pasangan ini tidak maju bersama pada pilkada 2015 dengan menggandeng pasangan masingmasing, Bupati Djohan Sjamsu berpasangan dengan Mariadi sedangkan wakil bupati Najmul Akhyar berpasangan dengan Syariffudin. Dengan terpisahnya kedua pasangan ini faktor penentu terpilihnya salah satu paslon dapat dipengaruhi oleh ketokohan. Apabila melihat latar belakang masyarakat Lombok Utara lebih condong pada NW. Sehingga, lawan mainnya Djohan Samsu tidak dapat disepelekan. Karena apabila melihat kemenanganya pada pemilu sebelumnya kemungkinan dapat dipengaruhi oleh wakilnya yang notabenenya pengurus NW

dan dekat dengan TGB Gubernur NTB yang saat ini menjadi ketua Nahdlatul Wathan.

Table 1. Hasil Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon pada Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Lombok Utara 2015-2020

No. Urut	Nama	Jumlah Suara	Persentase
1	Djohan Sjamsu & Mariadi	59.511	46,55%
2	H. Najmul Akhyar & Sarifudin	68.326	53,45%

Sumber: KPU Kabupaten Lombok Utara, 2015

Di Lombok NW merupakan organisasi terbesar di NTB tersemasuk di di Kabupaten Lombok Utara, sehingga tidak bisa dipungkiri terpilihnya atau kemenangan H. Najmul Akyar untuk mendapat kan kursi Bupati dapat dilatar belakangai oleh keikutsertaannya dalam organisasi yang sedang dijalankannya yakni NW.

Disamping itu, dibanyak artikel mengatakan kedekatan antara TBG (Tuan Guru Bajang) yang merupakan Gubernur NTB dan Pimpinan pusat organisasi Nahdlatul Wathan dengan Najmul Akhyar dalam memenangkan jabatan sebagai orang nomor satu di Kabupaten Lombok Utara. Tentunya kemenangan yang diperoleh juga tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh Nahdlatul Wathan yang mempengaruhi pemilih untuk memperoleh dukungan dari masyarakat di Kabupaten Lombok Utara.

Namun dinamika politik Kabupaten Lombok Utara yang menarik dimana kedua pasangan incumbent memilih untuk maju pada pilkada dengan pasangannya masing-masing. Meskipun Najmul Akhyar mendapat dukungan dari TGB pengurus besar NW, namun secara kepartaian TGB sebagai ketua partai demokrat yang menjanjikan kepada pimpinan pusat partai Demokrat untuk memenangkan kader partai di setiap pertarungan pemilu di NTB sehingga, TGB secara kepartaian mendukung pasangan Djohan-Mariadi karena posisi Djohan Sjamsu sebagai ketua partai Kabupaten Lombok Utara (http://lombokpost.net diakses pada 24 Maret 2019

Namun kehadiran TGB dalam kancah politik adalah untuk membesarkan organisasi NW sehingga TGB juga mendukung kader terbaik yang dimiliki NW yakni Najmul Akhyar. Setelah memenangkan pilkada Najmul Akhyar di lantik pada tahun 2017 sebagai ketua DPC partai Demokrat.

Nahdlatul Wathan sebagai organisasi keagamaan secara terbuka menyatakan terjun kedalam bidang politik sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Najmul Akhyar yang merupakan ketua PB NW daerah dan saat ini menjabat sebagai Bupati Kabupaten Lombok Utara periode 2015-2020 dalam sambutan yang disampaikan pada acara Hizban Akbar bersama keluarga besar Nahdlatul Wathan di Mushalla al Abror Pancor Lombok Timur menyatakan secara jelas bahwa NW merupakan organisasi yang tidak terbatas, perjuangan dan dakwah dilakukan melalui jalur politik (http://lombokita.com pada 17 Februari 2018).

Alasan tersebutlah yang digunakan organisasi ini dalam mengusung kaderkader terbaik NW untuk ikut dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, baik pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur maupun perhelatan politik ditingkat Kabupaten/Kota di beberapa daerah (http://lombokita.com pada 17 Februari 2018).

Disamping itu, organiasi NW juga memiliki strategi sendiri dalam pilkada tahun 2015 yang fokus dalam memobilisasi massa jamaah NW. artinya bahwa NW tidak tergabung dalam tim pemenangan Kabupaten yang dibentuk oleh partai pendukung tetapi bergerak sendiri melalui kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan seperti pengajian, hiziban, atau kegiatan social lainnya.

Dari pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa NW tidak ragu menunjukkan diri dalam kancah politik meskipun sebelumnya NW belum menyatakan sikap bahwa dirinya memang sudah terjun dikancah politik namun, dinamikan politik NW sangat jelas terlihat dengan diusungnya kader-kader NW untuk menduduki jabatan strategis dilembaga eksekutif maupun legislatif. Salah satunya adalah majunya Najmul Akhyar dalam pilkada 2015 yang tidak lepas dari dukungan Nahdlatul Wathan mengingat Najmul merupakan salah satu kader terbaik NW .

Dalam diskusi singkat penulis dengan salah satu pemuda NW Kabupaten Lombok Utara terkait dengan erat hubungannya keterlibatan Nahdlatul Wathan dalam memenangkan Najmul Akhyar dalam pilkada hal ini dapat ditandai dengan sebelum berlangsungnya masa kampanye yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lombok Utara, organisasi NW telah mengatur jadwal ceramah Najmul Akhayar

di masjid-masjid setiap kecamatan di Kabupaten Lombok Utara, kegiatan yang dilakukan ini berlangsung selama 3 bulan. Disamping itu, pada saat kampanye NW hanya menonjolkan sosok Najmul Akhyar di setiap pilkada seperti baliho, stiker dari NW hanya menunjukkan Najmul dengan pendiri NW.

Berdasarkan latar belakang diatas terkait tentang besarnya pengaruh organsasi keagamaan di Nahdlatul Wathan menjadi jalan bagi kader-kadernya untuk memimpin daerah ditingkat Kabupaten/Kota Sehingga, peneliti akan melihat bagaimana "Strategi Nahdatul Wathan Dalam Memenangkan H. Najmul Akhyar Pada Pilkada di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015".

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, dapat ditarik sebuah rumusan masalah yaitu "Bagaimana Strategi Nahdlatul Wathan Dalam Memenangan H. Najmul Akhyar Pada Pilkada di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015?"

1.3 Tujuan Penelitian

 Untuk mengetahui bagaimana strategi yang digunakan Nahdlatul Wathan untuk memenangan H. Najmul Akhyar Pilkada di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian Tesis ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini mampu memberi pengetahuan bagi pembaca khususnya dibidang Ilmu Pemerintahan tentang bagaimana keterlibatan ormas dan politik lokal di Kabupaten Lombok Utara dalam pemilu khususnya ormas Islam Nadlatul Wathan (NW).
- b. Hasil penelitian ini diharapakan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada pembaca secara umum khususnya untuk Pemerintah Daerah serta masyarakat di Kabupaten Lombok Utara bahwa adanya organisasi keagamaan Nahdlatul Wathan menjadi strategi kemenangan untuk mendapatkan posisi startegis dalam jabatan Pemerintahan baik itu Eksekutif dan Legislatif.